ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN EKSPLOITASI TERUMBU KARANG

****

**S K R I P S I**

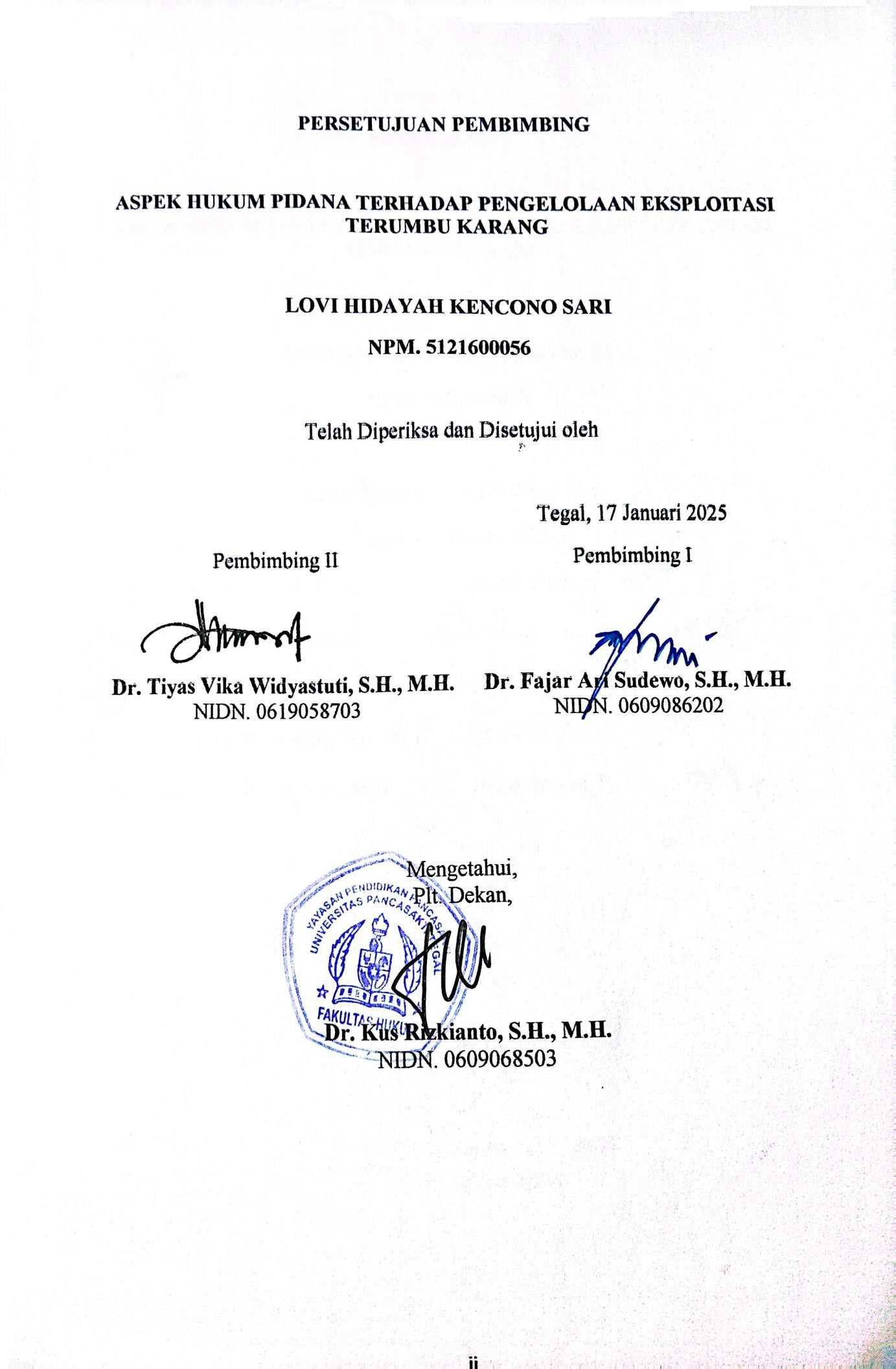
**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

# Oleh :

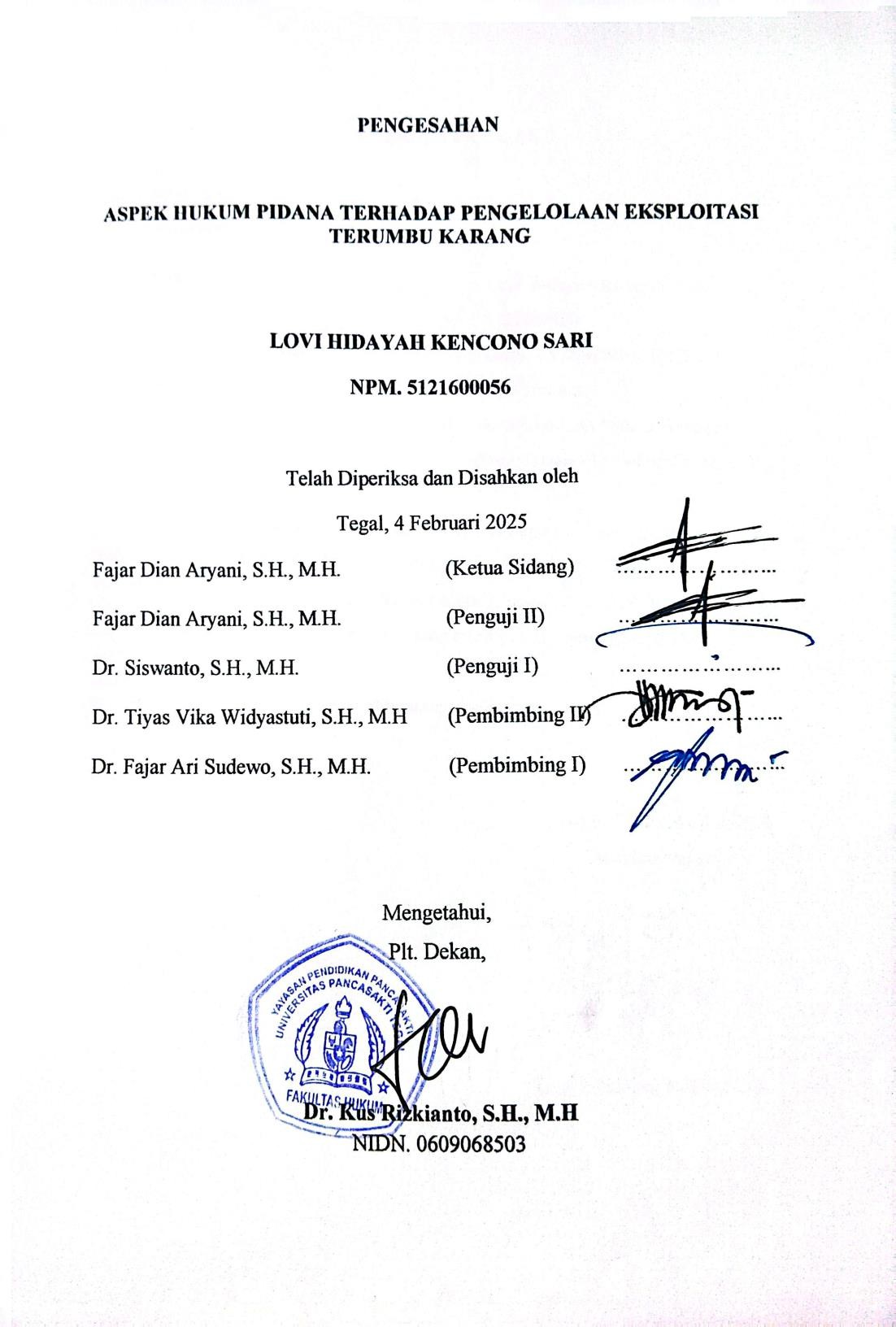
**Lovi Hidayah Kencono Sari NPM. 5121600056**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

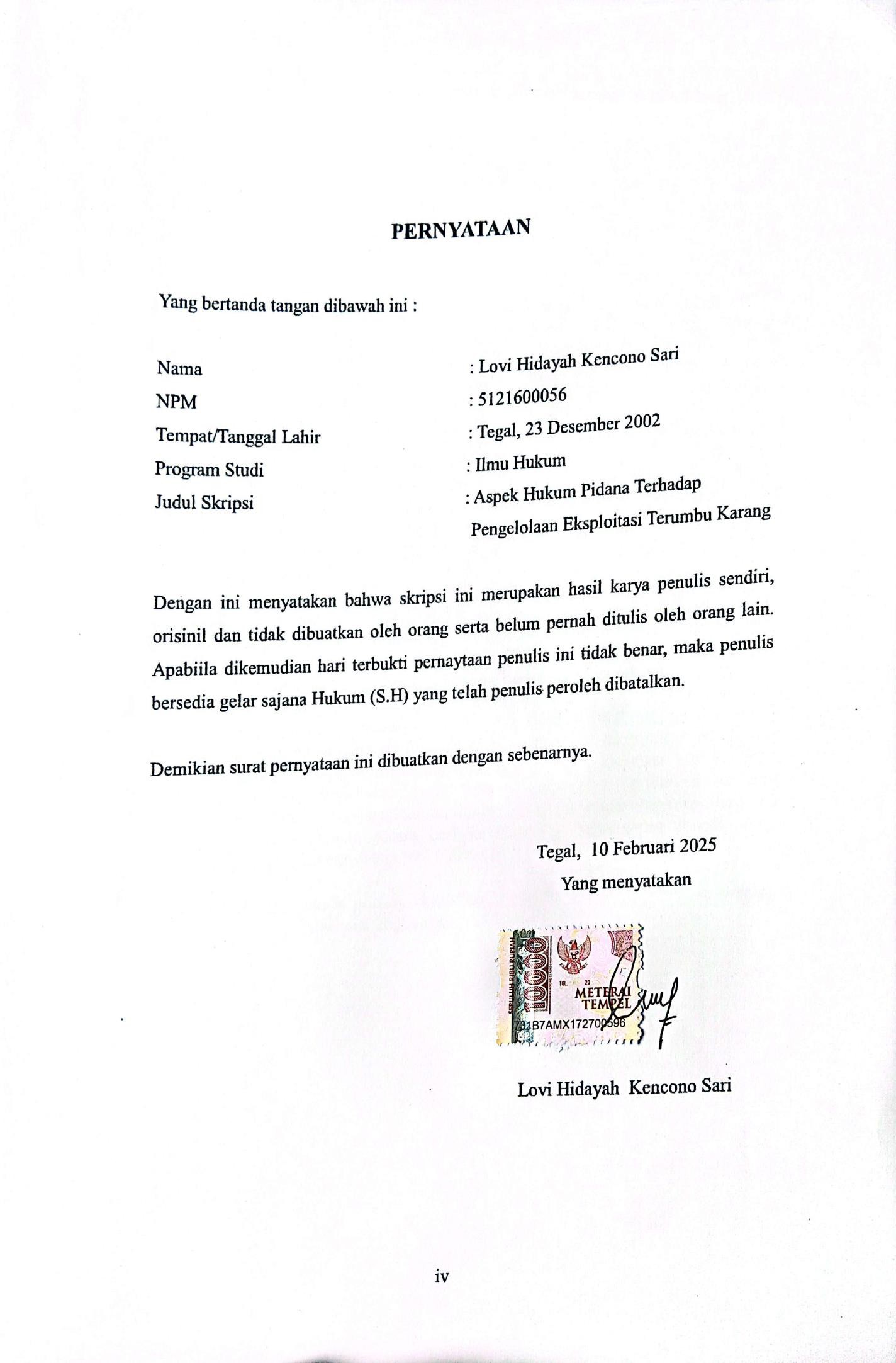
**2025**

****

ii



iii



iv

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terkait pengelolaan eksploitasi terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali, termasuk penangkapan ikan ilegal dan penggunaan bahan peledak, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif meliputi wawancara dengan pihak berwenang, dengan fokus pada penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan terumbu karang, Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum masih kurang oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung perlindungan terumbu karang dan efektivitas penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi terumbu karang masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta keterbatasan untuk kegiatan pengawasan. Selain itu, terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakan hukum yang lebih efektif dan regulasi untuk melindungi terumbu karang. Ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai untuk penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi terumbu karang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan eksploitasi terumbu karang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, demi menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.

**Kata kunci:** hukum pidana, eksploitasi, terumbu karang, penegakan hukum, konservasi lingkungan.

v

# ABSTRACT

This research aims to analyze the criminal law aspects related to the management of coral reef exploitation in Indonesia. Coral reefs are very important ecosystems for biodiversity and the welfare of coastal communities. However, uncontrolled exploitation, including illegal fishing and the use of explosives, has caused significant damage to these ecosystems.

The research method used is Normative approach includes interviews with authorities, focusing on criminal law enforcement in the context of coral reef protection, The results show that law enforcement is still lacking by the lack of human resources and facilities. This research recommends increasing socialization to the community to support the protection of coral reefs and the effectiveness of law enforcement.

The results show that law enforcement against coral reef exploitation still faces various obstacles, such as the lack of law enforcement, lack of trained human resources, and limitations for monitoring activities. In addition, there are challenges in coordination between government agencies responsible for environmental and natural resource protection. This research recommends the need for strengthening more effective law enforcement and regulations to protect coral reefs. This includes capacity building of human resources, provision of adequate facilities for law enforcement, as well as increased public awareness on the importance of coral reef conservation. With these measures, it is hoped that the management of coral reef exploitation can be carried out in a sustainable and responsible manner, in order to preserve Indonesia's marine ecosystems.

**Keywords:** criminal law, exploitation, coral reefs, law enforcement, environmental conservation.

vi

# MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesangupanya” (QS. Al Baqoroh: 286)

Penulis meyakini bahwa disetiap kemudahan pasti juga ada kesulitan yang datang lagi jadi hidup jagan terlalu, Disetiap rezeki dan kemudahan yang datang membawa kebahagiaan, namun di balik semua itu seringkali tersimpan rasa takut akan tantangan yang mungkin menyusul. Namun, kita harus ingat bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan keyakinan dan keteguhan hati, kita dapat menghadapi apa pun yang datang setelahnya, Jadi Tetap Semangat Apapun masalahnya.!

vii

# PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada Allah Swt;
2. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada yang paling utama kepada Ayah, Kapten.Inf. Radiyono Pahlawan saya yang akan menjadi panutan saya selamanya;
3. Dan unda saya Sri Herowati pintu surgaku, terima kasih telah mendoakan dan memberikan semangat yang tak pernah berhenti. Semoga kesehatan selalu menyertai kedua orang tuaku. kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendukung serta mendoakan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Kepada diriku sendiri, Lovi Hidayah Kencono Sari Terimakasih kamu telah bertahan dan berada pada titik ini, aku bangga pada diriku sendiri semoga kedepanya menjadiilmu yang berguna dan bermanfat bagi dirimu, orang lain dan jadilah versi terbaik menurut dirimu;
5. Terimakih kepda dosen pembimbing saya Dr. Bapak Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Terima kasih atas arahan berharga yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini sebagai Pembimbing 1, Dan Dr. Ibu Tiyas Vika Widyastuti S.H., M.H, Terima kasih kepada Ibu Tiyas sebagai Pembimbing 2 yang telah membantu dalam proses penelitian ini;
6. Terimaksih juga pada temen temen seperjuangan saya yang selalu saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai;

viii

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyusun Skripsi ini dengan judul “Aspek Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang”. Skripsi ini disampaikan Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai Aspek hukum pidana Terhadap eksploitasi terumbu karang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penegakan hukum dalam terumbu karang, serta kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang hukum.

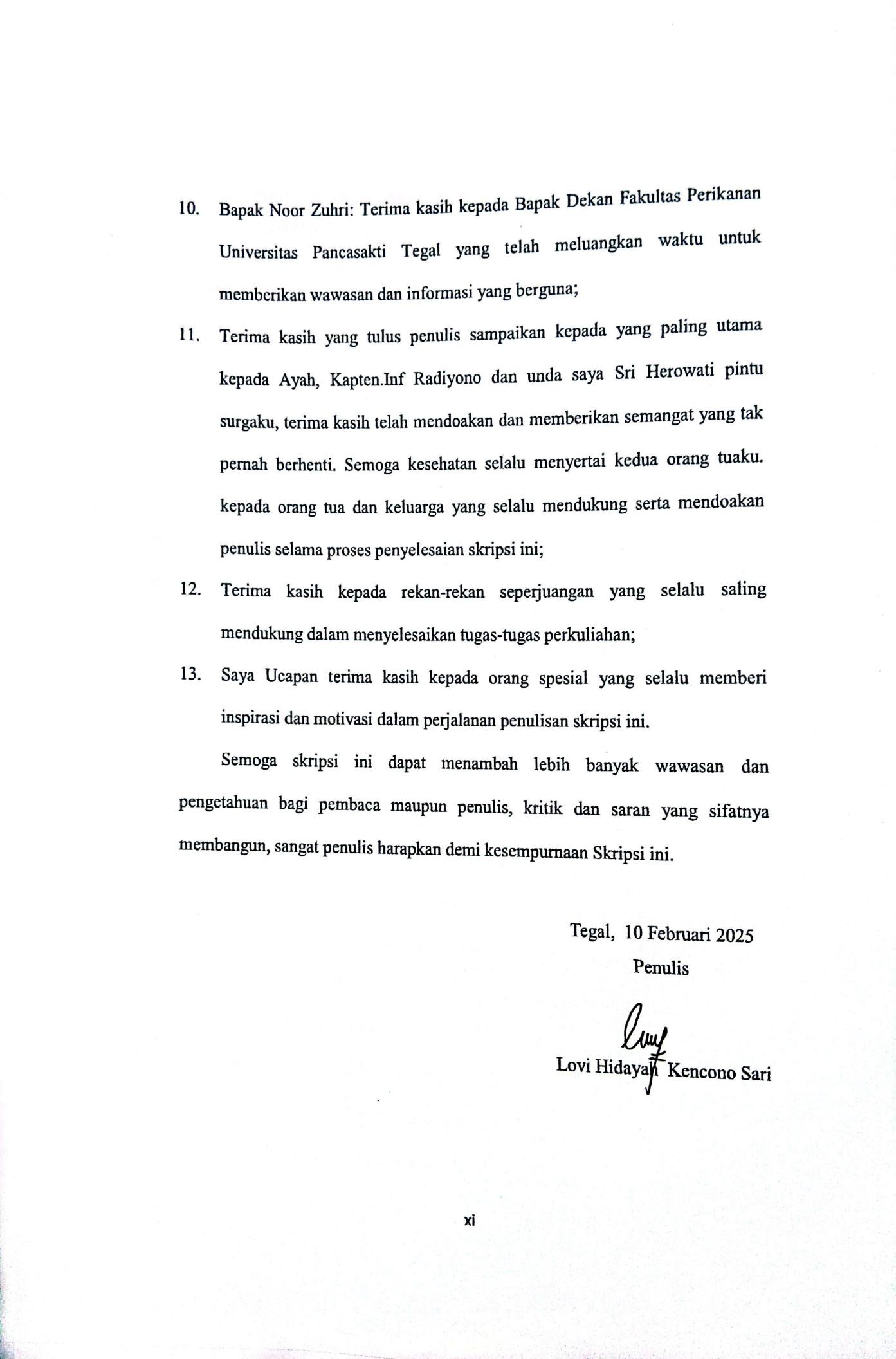
Penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari banyak pihak sangat penting dalam penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada bapak Rektor Dr. Taufiqullah, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik;
2. Dr. Kus Riskiyanto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Ucapan terima kasih kepada Dekan yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulisan skripsi ini;

ix

1. Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Terima kasih atas kesediaan Ibu Wakil Dekan 1 dalam memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti;
2. Fajar Dian Aryani, SH. MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti yang telah memberikan bimbingan dan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Moh. Khamim, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bimbingan dan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Bapak Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Terima kasih atas arahan berharga yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini sebagai Pembimbing 1;
5. Dr. Ibu Tiyas Vika Widyastuti S.H., M.H, Terima kasih kepada Ibu Tiyas sebagai Pembimbing 2 yang telah membantu dalam proses penelitian ini;
6. Kepada Bapak Ibu Dosen Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Strata I. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih, dan telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Ucapan terima kasih kepada staf administrasi yang selalu siap membantu dalam urusan administrasi akademik dengan sabar dan ramah;

x



xi

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERYATAAN iv

[ABSTRAK v](#_TOC_250023)

[ABSTRACT vi](#_TOC_250022)

[MOTTO vii](#_TOC_250021)

[PERSEMBAHAN viii](#_TOC_250020)

KATA PENGATAR ix

[DAFTAR ISI xii](#_TOC_250019)

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250018)
  2. [Rumusan Masalah 14](#_TOC_250017)
  3. Tujuan Penulisan 14
  4. Urgensi 14
  5. [Tinjauan Pustaka 15](#_TOC_250016)
  6. [Metode penelitian 15](#_TOC_250015)
  7. Sistematika Penulisan 19

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 21](#_TOC_250014)

1. [Tinjauan Umum Terhadap hukum pidana 21](#_TOC_250013)
   1. [Pengertian hukum pidana 21](#_TOC_250012)

xii

* 1. [Unsur-Unsur hukum pidana 24](#_TOC_250011)

1. [Tinjauan Umum Tentang Pemidanan (UU no 1 tahun 2023)](#_TOC_250010)
   1. Pengertian Pemidanan 33
   2. [Pengaturan Tentang Pemidanaan 35](#_TOC_250009)
2. Tinjauan Umum Pengelolan Eksplotasi terumbu karang 38
   1. [Pengertian Terumbu karang 38](#_TOC_250008)
   2. [Pengertian eksploitasi 42](#_TOC_250007)
3. Tinjauan Umum Aspek Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Terumbu karang 47
   1. [Aspek administrasi 52](#_TOC_250006)
   2. Aspek Hukum Pidana 53
   3. Aspek Perdata 54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56

1. Pengaturan Hukum Terhadap Ekploitasi Terumbu Karang 56
2. [Aspek Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang 75](#_TOC_250005)

[BAB IV PENUTUP 87](#_TOC_250004)

1. [Kesimpulan 87](#_TOC_250003)
2. [Saran 88](#_TOC_250002)

[DAFTAR PUSTAKA 90](#_TOC_250001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97

[LAMPIRAN 98](#_TOC_250000)

xiii

# BAB 1 LATAR BELAKANG

### Latar Belakang

Eksploitasi terumbu karang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat merugikan ekosistem laut dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Terumbu karang bukan hanya merupakan sumber daya alam yang berharga, tetapi juga merupakan ekosistem yang kompleks yang mendukung kehidupan laut. 1 Dalam konteks ini, pengelolaan dan perlindungan terumbu karang menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut.

Indonesia pada tahun 2007 telah menetapkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diubah Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 selanjutnya di sebut UU PWP2K, UU ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Pasal 35 UU PWP2K secara spesifik melarang setiap orang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.2

1 Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(4), 157-176.

2 Fadillah, S. A. (2019). Review of Criminal Law Sanctions on Damaged Coral Reefs. *Lex Scientia Law Review*, *3*(2), 219-226..

1

Indonesia adalah negara di asia tenggara yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua asia dan Australia antara samudra hindia dan samudra pasifik karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra, ia disebut juga sebagai nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia3. Dan bukan di Indonesia saja yang mengalami Pemutihan atau kerusaakan ekosistem terumbu karang di Kepulauaan atau di Negara lain pun sama mengalami hal tersebut, lalu sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km2 tersebut terdiri dari: perairan laut teritorial 0,3 juta km2, perairan nusantara 2,8 juta km2, perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km. 4

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar. 5 Potensi sumber daya alam suatu wilayah laut merupakan keunggulan komparatif, Berdasarkan letak geografisnya yang meliputi

3 Siswoputro, S., Perwita, A. A. B., Suseto, B., & Prakoso, L. Y. (2024). The World's Maritime Axis, A Critical Analysis. *Formosa Journal of Science and Technology*, *3*(3), 447-460.

4 Medcom.id, 1 Negara Kepulauan Terbesar di Dunia, Ada Indonesia, Putri Purnama Sari,

10 Juli 2024, https://[www.medcom.id/internasional/dunia/zNPXelON-11-negara-kepulauan-](http://www.medcom.id/internasional/dunia/zNPXelON-11-negara-kepulauan-) terbesar-di-dunia-ada-indonesia.

5 Tamaruddin, A., Laitupa, S., & Asrullah, A. (2024). Fungsi Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kesesuaian Ruang Laut Dan Implikasi Terumbu Karang Di Kecamatan Tapalang Barat*. Jurnal Hukum Unsulbar*, 7(1), 59-74.

sumber daya hayati dan nonhayati yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat6. Potensi tersebut dapat digali dari dasar laut, tanah di bawahnya, cekungan air dan permukaan laut termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis bila ekonomi kelautan dijadikan sebagai basis pembangunan ekonomi nasional. Potensi sumberdaya kawasan pesisir menurut Undang-undang ini meliputi: sumberdaya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain). 7

Sumber daya hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia, selain itu perairan indo-pasifik yang sebagian besar terletak di Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dan hutan laut yang menjadi habitat makhluk hidup di laut. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem-ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisasi yang berasosiasi dengan karang dan membentuk zat kapur. 8 Terumbu karang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai tempat pariwisata, tempat menangkap ikan, pelindung pantai secara alami, dan tempat keanekaragaman hayati, Rusaknya terumbu karang pada kawasan terumbu karang dan sekitarnya tentu akan mengancam produktivitasnya sekecil

6 Moa, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) Dalam Kasus Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kutai Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *6*(2), 33-48.

7 Rudianto, Buku Ajaran Pengelolan Wilayah Pesisir Dan laut Terpadu (PWPLT), 2018.

8 Arif Mustofa, S. T. (2023). *Buku Ajar Mata Kuliah Ekologi Perairan*. UNISNU PRESS.

apapun tingkat karang menerapkan prinsip-prinsip sistem pengelolaan kawasan konservasi laut.9

Terumbu karang memiliki berbagai peranan yang sangat penting dalam tatanan lingkungan kawasan pesisir dan lautan, baik ditinjau dari segi biologi dan ekologi maupun biotanya. Terumbu karang berfungsi sebagai gudang makanan yang produktif untuk perikanan, tempat pemijahan, bertelur, dan mencari makanan berbagai biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Secara fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pemecah ombak dan pelindung pantai dari sapuan badai, serta memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata bahari. 10

Ekosistem terumbu karang memiliki peran yang penting bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dalam ekosistem terumbu karang hidup berbagai makhluk laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber mata pencarian, serta sumber devisa bagi negara melalui industri pariwisata 11 . Tidak hanya itu saja, Terumbu karang merupakan ekosistem pantai tropis yang terbentuk dari susunan batuan kapur dari kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh hewan karang, hewan karang ini berukuran sangat kecil dan membentuk koloni yang kemudian diketahui sebagai karang, terumbu karang juga dapat berfungsi sebagai

9 Utomo, L., & Nadriana, L. (2020). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Lembaga Studi Hukum Indonesia. hlm. 122.

10 Tamaruddin, A., Laitupa, S., & Asrullah, A. (2024). Fungsi Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kesesuaian Ruang Laut Dan Implikasi Terumbu Karang Di Kecamatan Tapalang Barat. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *7*(1), 59-74..

11 Wahyudin, Y., Kusumastanto, T., Adrianto, L., & Wardiatno, Y. (2017). Jasa ekosistem lamun bagi kesejahteraan manusia. *Omni-Akuatika*, *12*(3).

penahan gelombang di pesisir pantai, bagian yang lebih menarik lagi adalah 70 % dari total oksigen yang ada di bumi dihasilkan dari laut.12

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang penting di daerah peisir perairan tropika. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang hidup di lautan.13 Terumbu karang juga berperan penting yakni sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, selain itu terumbu karang memliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Nilai ekologis tersebut yakni sebagai habitat dan juga sebgai tempat mencari makananan biota laut, serta nilai ekonomis dari terumbu karang yaitu sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut untuk konsumsi dan berbagai jenis ikan hias. Karang yang mati pun dapat dijadikan sebagai bahan kontruksi, bahan baku untuk farmasi, sebagai tempat rekreasi bahkan hiasan untuk aquarium.14

Melihat nilai ekologis dan nilai ekonomis, tersebut dapat dikatakan bahwa terumbu karang adalah sebagai ekosistem produktif di wilayah pesisir dan laut, maka dari itu terumbu karang sudah selayaknya agar tetap dijaga dan dilestarikan. Tetapi sangat disayangkan bahwa berbagai nilai ekologis dan ekonomis terumbu karang yang tinggi ini mengalami penurunan yang sangat menghawatirkan. Sekitar 85.000km2 luas terumbu

12 Nurdin, A., & Saudi, A. I. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Komunitas Ruang Baca Inspirasi (RBI) Desa Tonyaman Kabupaten Polewali Mandar Dalam Upaya Budidaya Terumbu Karang Yang Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, *1*(1), 25-33.

13 Zamdial, D. H., Anggoro, A., & Muqsit, A. (2019). “Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu”. *Jurnal Enggano Vol*, *4*(2), 160-173.

14 Idris, I., SW, M. P., & Rahmat, B. (2019). Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Lokasi dan Bukan Lokasi Penyelaman Pulau Maratua. *Jurnal Kelautan Nasional*, *14*(1), 59-69.

karang di Indonesia, lebih dari 40% dalam kondisi rusak dan hanya tinggal sekitar 6,5% terumbu karang dalam kondisi sangat baik.15

Kerusakan terumbu karang di Indonesia diindikasikan terutama sebagai akibat aktivitas manusia. Praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti pemboman, pembiusan dan penggunaan racun oleh nelayan di sekitar terumbu karang.16 Penambangan karang dan pasir juga turut andil dalam eksploitasi sumber daya ekosistem terumbu. Perusakan ini menjadi kekhawatiran akan punahnya biota laut di pulau kecil dan terganggunya keseimbangan ekologi yang selanjutnya berpengaruh terhadap berkurangnya populasi ikan. 17 Kerusakan Terumbu Karang diakibat adanya pemutihan terumbu karang, merupakan fenomena di mana terumbu karang kehilangan alga simbionnya (*zooxanthellae)* yang bertanggung jawab atas warna dan nutrisi karang, menyebabkan karang berubah menjadi putih pucat dan potensial mengalami kematian. Peristiwa ini telah terjadi beberapa kali pada skala global, seperti pada tahun 1983, 1998, dan 2010, dan telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem terumbu karang di Indonesia.18

Pemutihan terumbu karang (*coral bleaching)* merupakan fenomena

yang semakin serius dihadapi oleh ekosistem terumbu karang di Indonesia.

15 [Rahma R,](https://www.gramedia.com/literasi/author/rahma-r/) “10 Manfaat Terumbu Karang bagi Kehidupan Biota Laut dan Manusia”, https://[www.gramedia.com/literasi/manfaat-terumbu-karang/.](http://www.gramedia.com/literasi/manfaat-terumbu-karang/)

16 Dasmasela, Y. H., Pattiasina, T. F., Syafril, S., & Tapilatu, R. F. (2019). Evaluasi kondisi terumbu karang di Pulau Mansinam menggunakan aplikasi metode Underwater Photo Transect (UPT). *Median: Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta*, *11*(2), 1-12.

17 Arifin, A. N. (2022). Kerusakan, Lingkungan Kerusakan Lingkungan Laut Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Maluku Tenggara Akibat Faktor Alam dan Aktifitas Manusia:(Physico Natural Features Environmental Analysis). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *1*(2), 56-60.

18 Thamrin, T. (2017). *Karang dan Zooxanthellae*. UR. Press

Terumbu karang tidak hanya berperan sebagai sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir, tetapi juga sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari dampak badai, ombak, dan tsunami.19 Namun, terumbu karang saat ini menghadapi ancaman serius berupa pemutihan terumbu karang yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, peningkatan suhu permukaan laut, kontaminasi kimiawi, dan radiasi sinar ultraviolet.20 Matinya koloni karang dalam kejadian *bleaching* adalah akibat keluarnya *zooxanthellae* dari dalam jaringan tubuh karang secara permanen atau sulit terjadinya relokasi ke koloni yang sudah ditinggalkannya. Awal tahun 2010 merupakan waktu yang cukup panas dan suhu permukaan laut di beberapa tempat terlihat lebih tinggi dari biasanya. Dengan adanya pemanasan permukaan laut tersebut, sejumlah hotspot di perairan laut terbentuk termasuk di laut natuna bagian selatan. Hal ini telah menimbulkan pemutihan karang massal yang cukup serius di beberapa tempat, terutama di perairan laut andaman dan perairan Indonesia.21

Peristiwa pemutihan karang dalam skala besar atau *coral bleaching* massal dipengaruhi oleh naik- turunnya suhu permukaan laut (SPL), berbeda dengan pemutihan dalam skala kecil yang seringkali disebabkan karena tekanan langsung dari manusia sebagai contohnya polusi, yang

19 Bakti, L. A. A., Kusumo, B. H., Royani, I., & Quro, M. (2022). Kolaborasi Sebagai Strategi Adaptasi Masyarakat Di Pulau-Pulau Kecil Terhadap Perubahan Iklim. *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment*, *2*(1), 57-67.

20 Rendra, A., & Juniartho, D. (2024). Peran Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Terumbuh Karang. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 1-7.

21 Rudi, E. (2012). Pemutihan Karang di Perairan Laut Natuna Bagian Selatan tahun 2010.

*Biospecies*, *5*(1).

berpengaruh pada karang dalam skala kecil yang terlokalisir.22 Apabila suhu rata- rata terus menerus naik karena perubahan iklim dunia, karang hampir dapat dipastikan menjadi subjek pemutihan yang lebih sering dan ekstrim nantinya. Oleh karena itu, perubahan iklim saat ini dapat menjadi ancaman terbesar satu-satunya untuk terumbu karang di seluruh dunia. Kejadian *bleaching* merupakan fenomena umum pada suatu terumbu karang. Namun, *bleaching* massa merupakan gejala yang tidak umum terjadi.23 Biasanya hal ini dipicu oleh naiknya suhu air laut secara tiba- tiba, kejadian *coral bleaching* massal dilaporkan terjadi tahun 1998 di hampir seluruh perairan tropis dunia dan Indonesia yang diikuti dengan kematian massal koloni karang, terutama spesies yang tidak toleran terhadap perubahan suhu menjadi lebih tinggi, karang untuk para pengelola pesisir, pengambil keputusan, penasihat teknis dan lainnya.24

Pemutihan terumbu karang sangatlah merusak terumbu karang akan berdampak buruk terhadap ekosistem terumbu karang tersebut. Lebih luas lagi dapat berdapak pada terganggunya keseimbangan ekositem alam. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak didasari pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu faktor utama rusaknya terumbu karang. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),

22 *Ibid*.

23 Aldrian, E., Karmini, M., & Budiman, B. (2011). *Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia*. Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

24 Edwards, A. J., & Gomez, E. D. (2007). *Konsep dan panduan restorasi terumbu: membuat pilihan bijak di antara ketidakpastian.* Yayasan Terumbu Karang Indonesia..

Pasal 21 menyatakan bahwa, “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang.

Pemutihan terumbu karang sangatlah merusak terumbu karang akan berdampak buruk terhadap ekosistem terumbu karang tersebut. Lebih luas lagi dapat berdapak pada terganggunya keseimbangan ekositem alam. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak didasari pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu faktor utama rusaknya terumbu karang. Menurut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 21 menyatakan bahwa, “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang.

Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak hanya disebabkan oleh kegiatan yang sengaja merusak, tetapi juga oleh kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Beda dengan pemutihan terumbu karang yang disebabkan kenaikan suhu global menyebabkan *blancing* karang dan kerusakan terumbu karang. Oleh karena itu, UU PWP2K juga menetapkan sanksi pidana yang tegas untuk setiap orang yang

dengan sengaja atau kelalaian mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Pasal 73 UU PWP2K menyebutkan bahwa ”setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dapat dipidana”. 25 Kehidupan masyarakat yang belum tersentuh dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Adanya UUPWP2K, sebagaimana sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan PWP2K memberikan peluang yang besar kepada pemerintah Daerah untuk mengelola dan memberdayakan potensi tersebut.26

Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PWP2K adalah ”suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Seiring dengan sistem pemerintahan di Indonesia, maka sistem desentralisasi dilaksanakan oleh daerah melalui otonomi daerah. Pembagian daerah ini telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

25 Fadillah, *Loc.cit*.

26 Maringka, M. R., Kalalo, F. P., & Muaja, H. S. (2023). *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. *Lex Administratum*, *11*(4).

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan lembaga kepolisian. Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan (Satpolairud) harus dilakukan secara tegas dan bertahap untuk menjamin bahwa setiap pelanggar hukum dapat diadili secara tuntas. Dengan demikian PWP2K memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan melindungi ekosistem terumbu karang dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.27

Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam. Oleh sebab itu, negara di wajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai dengan ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat. Tindak pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU PWP2K dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan kelestarian

27 Kiara, *KLHK Dan KKP Harus Bertindak Tegas Perusak Terumbu Karang Wajib Diadili secara tuntas*, Jakarta 13 September 2022.

lingkungan hidup baik itu di darat, laut maupun udara, terlebih dengan adanya kegiatan yang tidak bertolak ukur pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berlebihan.28

Kasus salah satu contoh yang terjadi dikabupaten raja ampat pada tanggal 4 Maret 2017, akibat dari peristiwa kandasnya kapal MV Caledonian Sky diperairan pulau Mios mansuar kabupaten raja ampat mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang diprediksikan seluas 1600 M2. Kerusakan terumbu karang ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga untuk menindak lanjuti masalah tersebut, maka dilakukan berbagai langkah penyelesaian termasuk penanaman kembali terumbu karang yang russak tersebut. Bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam penyelesaian kerusakan terumbu karang, yaitu meminta ganti rugi atas kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh Kapal Pesiar asal Negara Inggris seluas 1.600 M2 yakni sebanyak Rp. 6.000.000.000.000.- (enam triliyun rupiah), yang disampaikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.29

Dampak dari insiden ini sangat signifikan, dengan kerusakan terumbu karang diperkirakan mencapai luas 1.600m². Kerusakan tersebut meliputi area seluas 300-400 meter lebar dan 100 meter panjang, yang menjadi

28 Latuconsina, H., Amri, K., & Triyanti, R. (2024). Peran penting pengelolaan perikanan laut berkelanjutan bagi kelestarian habitat dan kemanfaatan sumber daya. BRIN. Doi.10.55981/brin.908.c751.

29 Muharuddin, M., & Hidaya, W. A. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat. *Justisi*, *6*(2), 64-76.

habitat bagi berbagai biota laut. Pemerintah Indonesia segera membentuk tim investigasi untuk menangani masalah ini, melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim ini bertugas untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan serta merencanakan langkah-langkah pemulihan. Dalam upaya untuk menuntut ganti rugi, pemerintah juga meminta pihak asuransi kapal untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Kapten kapal telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti kerugian melalui asuransi, namun proses pemulihan dan penuntutan hukum masih dalam tahap awal. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat regulasi maritim dan perlindungan lingkungan, terutama di kawasan-kawasan sensitif seperti Raja Ampat yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

Kasus seperti insiden kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang. Tindakan tegas diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan lingkungan laut. Keberhasilan dalam melindungi terumbu karang juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga ekosistem yang vital ini.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai undang-undang, berupaya melindungi ekosistem terumbu karang dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi

terumbu karang memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, undang-undang yang ada memberikan kerangka hukum untuk melindungi terumbu karang dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik meneliti lebih mendalam mengenai **Aspek Hukum Pidana Terhadap Pengelolaan Eksploitasi Terumbu Karang.**

### Rumusan Masalah

* 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Eksploitasi terumbu karang?
  2. Bagaimana Aspek Hukum Pidana Terhadap Pengelolan Eksploitasi Terumbu karang?

### Tujuan Penelitian

* 1. Untuk menganalisis hukum terhadap eksplotasi terumbu karang.
  2. Untuk menganalisis fenomena aspek hukum pidana terhadap eksploitasi terumbu karang.

### Urgensi Penelitian

Peneliti ini dapat memberikan kontribusi terhadap efektifitas penegak hukum yang berkaitan dengan pelanggaran eksplotasi terumbu karang, Penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik hukum tersebut diimplementasikan dan apakah sanksi yang ada cukup memberikan efek jera, koordinasi antar lembaga seringkali tidak optimal, dan pengetahuan aparat penegak hukum tentang undang-undang terkait masih terbatas, meski ada undang-undang yang mengatur, implementasinya

sering kali lemah, sehingga efektivitas penegakan hukum belum memadai untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

### Tinjauan Pustaka

Fathur Kesarisi Sholahuddin (2024): Skripsi ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang akibat kapal yang kandas di Taman Nasional Karimunjawa. Penelitian ini mengeksplorasi dampak spesifik dari insiden tersebut serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Perbedaan dari penelitian terletak pada pembahasan dimana skripsi diatas mengkaji tentang pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang, Sedangkan Peneliti Peningkatan efektifitas apakah sanksi yang ada cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.30

Andriyawan (2021): Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap terumbu karang di Taman Nasional Kepulauan Togean dari kerusakan akibat penambangan karang untuk batu pondasi. Fokusnya adalah pada upaya pencegahan dan solusi perlindungan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. 31 Perbedaan dari penelitian terletak pada pembahasan dimana skripsi diatas mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap terumbu karang di Taman Nasional,

30 Sholahuddin, F. K. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas di Taman Nasional Karimunjawa (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

31 Andriyawan. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadao Terumbu Karang Ditaman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah Dari Kerusakan Akibat Penambangan Karang Untuk Batu Pondasi”, *Skripsi.* Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. https://e-journal.uajy.ac.id/24491/1/1605126171.pdf

sedangkan peneliti Penekanan untuk mengevaluasi seberapa baik hukum tersebut diimplementasikan, termasuk pada terumbu karang yang memutih.

Arya Adhi Prasetya (2023): Skripsi ini meneliti penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang berdasarkan UUPWP2K. Penelitian ini lebih menekankan pada proses hukum dan implementasi regulasi dalam konteks penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal terumbu karang. perlindungan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perbedaan dari penelitian terletak pada pembahasan dimana skripsi diatas mengkaji tentang penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang berdasarkan UUPWP2K 32 Sedangkan peneliti mengevaluasi seberapa baik hukum tersebut diimplementasikan dan apakah sanksi yang ada cukup memberikan efek jera.

### Metode Penelitian

* 1. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* yaitu penelitan menggunakan data sekunder data penelitian ini dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen, metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini.33 Alasan penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data diperoleh dari literatur maupun dokumen-dokumen yang lainnya baik, dari berupa data akan dikumpulkan dari peraturan-peraturan tindak pidana, undang-undang,

32 Prasetya. A. A., (2023). *Loc.cit*

33 Zainuddin Ali, (2016). *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.68.

Diakses dari https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12346.

dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan eksploitasi terumbu karang.

* 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian normatif yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh tidak boleh menurut hukum yang berlaku)34 termasuk UUPWP2K. Penelitian ini akan fokus pada aspek-aspek internal dari hukum positif terkait dengan pengelolaan eksploitasi terumbu karang, Metode ini cocok untuk meneliti aspek-aspek internal dari hukum positif terkait dengan pengelolaan eksploitasi terumbu karang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

* 1. Data Penelitian

Data penelitan ini menggunakan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

* + 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan-badan pemerintahan. Dalam penelitian ini, sumber

34 Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum : Teori Dan Praktek.* Media Penerbit Indonesia

data utama UUPWP2K dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.35

* + 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Sumber ini akan digunakan untuk memperkaya analisis dan memastikan keakuratan hasil penelitian.36

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan melalui berbagai sumber bacaan tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, riset riset yang sudah ada dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan eksploitasi terumbu karang.37

* 1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal

35 Amarudin, Zainal Asikin.. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta RajawaliPers, Hlm. 118, 2010.

36 Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia.

37 Op.cit, Zainuddin Ali, 107.

yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.38 Dari hasil data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menjadi data kualitatif yaitu dengan data-data yang sudah diperoleh dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum terkait dengan menggunakan perangkat normatif, penelitian ini akan dilakukan dengan menyelidiki perspektif partisipan dengan strategi interaktif. 39

### Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan, yaitu :

Bab I Pendahuluan. latar belakang menjelaskan pentingnya pengelolaan terumbu karang dan dampak eksploitasi yang tidak berkelanjutan, tujuan penelitian: rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, tinjauan pustaka (review) kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual yang membahas tentang tinjauan umum terumbu karang, tinjauan umum pelanggaran eksploitasi, tinjauan umum hukum pidana lingkungan hidup, tinjauan umum hukum pidana dan kebijakan Undang-undang di Indonesia yang berhubungan dengan

38 Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=414215

39 Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta. Lihat juga Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.

permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel yang diangkat dalam judul.

Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan dalam bab ini data hasil penelitian yang diolah, yang pertama adanya aspek hukum pidana dalam pengelolaan Terumbu Karang, Sanksi pidana evaluasi sanksi yang diatur dalam UU PWP2K dan implementasinya di lapangan dalam pengelolaan terumbu karang guna mencegah kerusakan ekosistem terumbu karang.

Bab IV Penutup, Pada Bab ini menjelaskan Kesimpulan semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Ringkasan temuan tentang aspek hukum pidana dalam pengelolaan eksploitasi terumbu karang.

# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

### Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana

### Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum serta menetapkan sanksi bagi pelakunya. Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, seperti kejahatan dan pelanggaran. Berikut adalah mengenai aspek hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*). Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari system kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.40 Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya. Hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum.

Istilah pidana yang digunakan Hukum adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukuman,

40 Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum, Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana, HKUM4203/MODUL 1, https://repository.ut.ac.id/4058/1/HKUM4203-M1.pdf.

21

Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.41

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar. Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman sanksi bagi pelanggar.

Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, Friedmaan memberi pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain, Hal ini diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.42

Menurut moeljatno hukum pidana Indonesia. Moeljatno memaknai “hukum pidana” sebagai bagian dari keseluruhan hukum

positif di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-

hlm.71

41 Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung. Alumni. 2006.

42 PAF Lamintang, Delik-delik Khusus. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 185.

aturan untuk, dan menurut moljatno hukum pidana memiliki tiga aspek utama: yang pertama Perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar, yang kedua Pengenaan sanksi Hukum ini dapat dilaksanakan yang terakhir menentukan kapan dan dalam kondisi apa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.43

Menurut Sudarto bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. 44

Pandangan mengenai Aspek hukum Pidana dalam pengertinnya belum ada yang pasti artinya belum ada sebuah pengertian hukum yang menjadikan dasar standar dalam memahami makna dan konsep hukum, hanya saja beberapa ahli memberikan suatu defenisi pandangan mengenai pengertian Hukum, mengenai apa itu hukum dan mengenai apa itu pidana telah diuraikan diatas secara gamblang. Namun, pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana secara singkat.

### Unsur-unsur Hukum Pidana

43 Dion Valerian, Kriteria kriminalisasi analiss pemikiran moeljatno, sudrato, theo de roos, dan iris haenen, VeJ, Volume 8 Nomor 2- 416. 2022.

44 Takdir., Mengenal hukum pidana*,* Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013, [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669/1/Hukum%20Pidana.pdf.](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669/1/Hukum%20Pidana.pdf)

Hukum pidana materil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimanan pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.45 Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil mengatur unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi: Actus Reus (Tindakan) merupakan Perbuatan fisik atau kelalaian yang melanggar hukum, sedangkan Mens Rea (Kesalahan) merupakan Niat atau keadaan mental pelaku saat melakukan perbuatan.46

Dalam percakapan sehari-hari, terminologi, hukum pidana lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Moeljatno maupun penulis maka pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana

formil.

45 Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum, Opcit, 1.12.

46 [Maksum Rangkuti,](https://fahum.umsu.ac.id/author/maksumrangkuti/) Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip, fakultas hukum umus, 2023, https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/.

Menurut penulis, hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilaran disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Secara umum, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori: Unsur subjektif meliputi kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dari pelaku, niat atau maksud pelaku, serta ada atau tidaknya perencanaan, dan selanjutnya Unsur objektif mencakup sifat melawan hukum dari perbuatan, kualitas pelaku, dan kausalitas antara tindakan dan akibat.47

Mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terdapat dua kategori unsur yang harus dipenuhi: Unsur subjektif terdiri dari Kesengajaan (Dolus) merupakan niat pelaku untuk melakukan perbuatan terlarang, kemudian kealpaan (Culpa) yang berarti Ketidaksengajaan atau kelalaian pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, serta perencanaan yang merupakan apakah tindakan tersebut direncanakan sebelumnya atau tidak. Selanjutnya ada unsur objektif terdiri dari sifat melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan norma hukum

47 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, 2014, 182-

184.

yang berlaku. Berikutnya kualitas pelaku, yang Menentukan apakah pelaku memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dan Kausalitas yang berarti hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua unsur ini harus ada agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.48

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh undang-undang.

Banyak teori hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum pidana dalam berbagai versi dan mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas tampaknya pernyataan-pernyataan ini saling bertentangan, tetapi sebenarnya mereka tidak saling bertentangan. Sebab, itulah salah satu fase esensial hukum dimana di satu sisi hukum harus mengandung unsur kepastian dan kepastian, sehingga harus stabil. Namun di sisi lain, hukum harus bersifat dinamis, agar selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.49

48 Op.cit, Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, 2002, Hal 78.

49 Reibyron Nazurullah, Aspek- aspek penegak hukum tindak pidana hukum progresif(studi sosiologi hukum pandangan satjipto rahardjo), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, ISSN (Print) 2338-1051.

* + 1. Asas-Asas Hukum Pidana

[Asas hukum pidana](https://id.paktoro.com/asas-hukum-pidana/) adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana suatu negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas hukum pidana mencakup nilai-nilai moral dan etis yang menjadi dasar normatif dari pembentukan hukum Beberapa asas penting dalam hukum pidana yang digunakan dalam penelitian ini yakni Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang- undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan, Tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang- undang sebelum tindakan dilakukan, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dimana seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat saat melakukan perbuatanSanksi Pidana.50

* + 1. Sanksi pidana

Hukum pidana menetapkan berbagai sanksi untuk pelaku tindak pidana, termasuk hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan masyarakatPidana

50 [Syahrial Fauzi,](https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/author/65fd09c547f40704/) Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya, artikel amuara, 2024, https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/.

merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.51

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana karena pidananya juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk Pertanggung jawaban dan ketidak setujuan terhadap perilaku tertentu.52

Sanksi pidana secara luas merujuk pada hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait sanksi pidana, Sanksi pidana adalah bentuk

51 Adami Chazawi, Op, Cit, hlm.24

52 Ibid.

hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Sanksi ini dapat berupa penahanan, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh hukum.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana. 53

Kenyataannya, tidak mudah untuk melakukannya menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini disebabkan sulitnya menentukan ada tidaknya rasa bersalah dalam korporasi karena korporasi sebagai pokok bahasan Hukum Pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti manusia dan terkadang dalam suatu kasus perusahaan tidak bisa dihukum karena kesalahan seorang pekerja. Ini Makalah ini akan membahas dan menganalisis terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu melakukan kejahatan lingkungan hidup.

53 Aryo Fadlian, Pertanggung jawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis, *Jurnal Hukum positum,* Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.10-19.

* + 1. Pertanggung jawaban Pidana

Konsep kejahatan dan pertanggung jawab pidana menjadi fokus utama dalam hukum pidana. Pelaku kejahatan dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlakuPertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan tindakannya di hadapan hukum. Prinsip dasar dari pertanggung jawaban ini adalah asas kesalahan (*culpability*), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika terbukti melakukan kesalahan. Dalam beberapa kasus, terdapat juga konsep tanggung jawab *vicariou*s (tanggung jawab pengganti), di mana pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pelaku. Tanggung jawab yang ketat mengharuskan terdakwa untuk secara pribadi terlibat dalam tindakan kriminal. Pertanggungjawaban perwakilan (*vicarious liability)* pertanggungjawaban yang membebankan tanggung jawab pidana seorang terdakwa kepada terdakwa lain karena adanya hubungan hukum.54

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengembalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia dapat dilihat dari insiden sebuah kapal pesiar yang kandas diantara sekumpulan terumbu karang, dimana kapal yang

54 [Alaska Criminal Law – 2022 Edition,](https://pressbooks.pub/alaskacriminallaw2022/) Vicarious Liability in Criminal Law Contexts,2022.

dinakhodai oleh seorang kapten tersebut berupaya untuk mengeluarkan kapalnya tanpa mempertimbangkan faktor gelombang maupun kondisi alam di sekitarnya. Upaya yang dilakukan oleh kapten tersebut berhasil. Dibalik usahanya, ada akibat yang ditimbulkan dari kelalaian kapten tersebut yang berimbas pada rusaknya terumbu karang.

Selama ini pertanggungjawaban pidana di Indonesia menganut prinsip rasa bersalah sebagai tambahan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Konsep prinsip kesalahan adalah lahir dari konsep tidak ada kriminal tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* permulaan). Prinsip itu sangat penting prinsip dalam akuntansi bagi pembuat a tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Seseorang dipertimbangkan tidak dapat dihukum jika dia tidak berbuat salah, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, Prinsipnya adalah prinsipnya berangkat dari pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas rasa bersalah (*liability)* berdasarkan kesalahannya.55 Seseorang akan dimintai pertanggung jawabannya tindakannya yang melanggar hukum. Tanggung jawab pidana adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan pencipta atas tindakan yang telah dilakukannya.

55 Ibid,

Tanggung jawab perwakilan sebenarnya bukan apa-apa baru, konsep tanggung jawab ini telah menjadi dikenal dalam lingkungan hukum perdata. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan tidak hanya pidana penjara dan denda, melainkan harus adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pengembalian kerusakan ekosistem terumbu karang. Pertanggungjawaban pengembalian ini sangat diperlukan mengingat terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat sensitif, dan jika dirusak memerlukan waktu yang sangat lama dalam pemulihan serta pengembalian kerusakan tersebut.

Pertanggungjawaban pengembalian kerusakan ekosistem terumbu karang oleh pelaku tersebut belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengaturan ini sangat diperlukan untuk masa yang akan datang.Secara sipil tanggung jawab perwakilan hukum diterapkan pada kasus-kasus kerugian (tort). Tort adalah pembayaran kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang merugikan pihak ketiga. 56

Perumusan tanggung jawab perwakilan kebijakan di Indonesia saat ini lebih banyak berfokus pada kejahatan korporasi. Dalam konsepnya pertanggungjawaban perwakilan

atas tindak pidana korporasi bertindak, jika seseorang atau

56 Fitri Anugrah,Topo Santoso,Vicarius liability in corporate crime cases against environmental crimes in the forestary sector Jressem,2023, Vol. 02 No. 5,844 – 851 E-ISSN: 2807

-6311, P-ISSN: 2807 – 6494, [https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem.](https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem)

pekerja perusahaan bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, dan melakukan kejahatan, maka penjahatnya tanggung jawab dapat dibebankan pada perusahaan.57

### Tinjauan Umum Tentang Pemidanan (UU no 1 tahun 2023)

* 1. **Pengertian Pemidananan**

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik. Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oIeh Negara”.

Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan

57 Ibid,

oleh Roeslan Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana. 58 Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut straftoemeting dan dalam Bahasa Inggris disebut sentencing. Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

### Pengaturan Tentang Pemidanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. UU ini menggantikan KUHP yang lama, yang berasal dari era kolonial Belanda, dan dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta

58 Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidananan*, Tegal:PT.Djava Sinar Perkasa, 2022, hlm. 27.

perkembangan masyarakat modern. Salah satu fokus utama dari UU ini adalah tujuan pemidanaan, yang mencakup beberapa aspek penting.

Permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya. Hal itu tergerus baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Jadi pidana mati memang merupakan jenis pidana terberat, karena dengan pidana mati nyawa manusia akan terengut, walaupun hak asasi manusia mempertahankan hidupnya. Penerapan pidana mati di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.59

Bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Memperhatikan KUHP baru yang dimuat dalam Udang-undang Nomor 1 tahun 2023 akan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 mengatur pidana mati

59 Gabrielle Aldy Manoppo, et.all, Analisis pidana mati berdasrkan pasal 100 undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratu langi Lex Administratum,* Vol XIII/No.1/Sept/2023, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196.

diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Bilamana diperhatikan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

* + 1. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:
       1. “mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
       2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
       3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
       4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.60
    2. Filosofi di Balik Pemidanaan

60 Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda, Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, volume 4, Nomor2, September2024.

UU No. 1 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan neo-klasik dalam pemidanaan, yang berusaha menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan) dan subjektif (sikap batin pelaku). Pendekatan ini mengakui bahwa tidak semua pelanggaran hukum memiliki konteks yang sama dan bahwa motivasi serta keadaan pelaku harus dipertimbangkan dalam proses pemidanaan.

Perubahan filosofi pemidanaan ini juga dapat menjadi jawaban atas permasalahan sistemik pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah over kapasitas. Hadirnya pidana alternatif di dalam sistem pemidanaan Indonesia dapat menjadi Solusi dari over kapasitas Lapas serta sebagai perwujudan dari perubahan tujuan pemidanaan yang dibawa oleh KUHP 2023.61

* + 1. Perubahan Signifikan dalam KUHP
       1. “Penghapusan Diskriminasi UU ini berupaya menghilangkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan lebih terhadap hak asasi manusia;

61 Allison Dara Dharmawan , Nadira Karisma Ramadanti, Pidana Alternatif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan, Presidensial, *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik,* Volume. 1 No. 4 Desember 2024.

* + - 1. Penegakan Hukum yang Lebih Transparan melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur hukum, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel;
      2. UU ini memperkenalkan berbagai kategori sanksi, termasuk denda dan hukuman penjara, yang dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana.”

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam tujuan pemidanaan di Indonesia. Dengan penekanan pada rehabilitasi, pencegahan, dan restorasi, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi. Diharapkan bahwa penerapan undang-undang ini dapat mendukung pembangunan hukum nasional yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

### Tinjauan Umum Tentang Pengelolan Eksplotasi terumbuk karang

### Pengertian Terumbu karang

Terumbu Karang berasal dari dua kata yaitu terumbu dan karang, dimana masing-masing kata mempunyai pengertian masing- masing. Terumbu adalah hasil endapan massif Kalsium Karbonat (CaCo3) yang terbentuk dari proses metabolisme biota laut yang berimbiosis dengan alga *Zooxanthellae,* sedangkan Karang merupakan individu-individu berukuran kecil yang disebut polip. Jadi

dapat disimpulkan bahwa terumbu karang adalah Kumpulan dari hewan karang (polip) yang membentuk terumbu.62

Terumbu karang adalah ekosistem laut yang kompleks dan beragam, dibentuk oleh akumulasi struktur kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan laut kecil yang disebut polip karang. Secara ilmiah, terumbu karang termasuk dalam *filum Cnidaria*, kelas *Anthozoa,* dan merupakan struktur penting di perairan dangkal, terutama di daerah tropis.

Terumbu karang secara umum dapat didefinisikan kepada struktur fisik beserta [ekosistem](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem) yang menyertainya yang secara aktif membentuk [sedimen](https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimen) [kalsium karbonat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium_karbonat) akibat aktivitas [biologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi) (biogenik) yang berlangsung di bawah permukaan [laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut). Bagi ahli [geologi,](https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi) terumbu karang merupakan struktur batuan sedimen dari kapur (kalsium karbonat) di dalam laut, atau disebut singkat dengan terumbu. Bagi ahli biologi terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas [coral.](https://id.wikipedia.org/wiki/Koral)

Dalam peristilahan terumbu karang yang dimaksud adalah [coral,](https://id.wikipedia.org/wiki/Koral) sekelompok [hewan](https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan) dari [ordo](https://id.wikipedia.org/wiki/Ordo) [Scleractinia](https://id.wikipedia.org/wiki/Scleractinia) yang menghasilkan [kapur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kapur) sebagai pembentuk utama terumbu. merupakan salah satu organisme laut yang tidak bertulang belakang (*invertebrate*), berbentuk polip yang berukuran mikroskopis, Terumbu adalah batuan sedimen kapur

62 Artikel kabin kp blitar, Apa Itu Terumbu Karang? Seberapa Penting Terumbu Karang itu, 2024, https://dkp.jatimprov.go.id/unit/dkp-blitarkab/news/view/3420.

di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut.63

Istilah terumbu karang ini merupakan terjemahan langsung bahasa Inggris dari kata reef atau terumbu adalah serangkaian struktur keras dan padat yang berada di dalam atau dekat permukaan. air. . Kerangka karang mengalami [erosi](https://id.wikipedia.org/wiki/Erosi) dan terakumulasi menempel di dasar terumb Sedangkan coral atau karangnamun mampu menyerap kapur dari air laut dan mengendapkannya sehingga membentuk timbunan kapur yang padat.64

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang ber[simbiosis](https://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis) dengan sejenis tumbuhan [alga](https://id.wikipedia.org/wiki/Alga) yang disebut *zooxanthellae*. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum *Cnidaria* kelas Anthozoa yang memiliki [tentakel.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentakel) Kelas [*Anthozoa*](https://id.wikipedia.org/wiki/Anthozoa)tersebut terdiri dari dua Subkelas yaitu *Hexacorallia* (atau *Zoantharia*) dan *Octocorallia*, yang keduanya dibedakan secara asal-usul [morfologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi) dan [fisiologi.](https://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi)65

Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut [polip.](https://id.wikipedia.org/wiki/Polip) Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh [tentakel.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentakel) Namun pada kebanyakan [spesies,](https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies) satu individu polip karang akan berkembang

63 Faizal Kasim, Pelestarian Terumbu Karang untuk Pembangunan Kelautan Daerah Berkelanjutan, Makalah pada Penyuluhan Kemah Bhakti UNG Desa Olele, 2011, hal 2.

64 Ibid.

65 Ibid.

menjadi banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan [mikroorganisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme) laut lainnya yang belum diketahui.

Pentingnya dan manfat terumbu karang bagi habitat dan penyedia makanan bagi berbagai hewan laut ekosistem terumbu karang merupakan habitat yang sangat ideal bagi berbagai hewan laut seperti ikan dan invertebrata laut lain. Terumbu karang mampu menyediakan berbagai makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi hewan-hewan tersebut. 66 Terumbu karang memiliki banyak manfaat ekologis dan ekonomi, termasuk menyediakan habitat bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya, melindungi garis pantai dari gelombang laut dan erosi, menjadi sumber pendapatan melalui pariwisata dan perikanan.

Terumbu karang biasanya ditemukan di perairan dangkal yang jernih dan hangat (suhu lebih dari 22°C) dengan kadar kalsium karbonat yang tinggi. Ada beberapa tipe terumbu karang, termasuk terumbu karang tepi (*fringing reef*), terumbu penghalang (*barrier reef),* dan terumbu atol (*atoll)* yang masing-masing memiliki karakteristik dan lokasi pertumbuhan yang berbeda.67

### Pengertian Eksploitasi

66 Citra septiani, fakta terumbu karang, birokindinesia, 2024, https://www.biorock- indonesia.com/fakta-terumbu-karang.

67 Op.cit, artikel akin kp blitar .

Eksploitasi terumbu karang adalah tindakan pengambilan atau pemanfaatan terumbu karang secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas ekosistem terumbu karang, Kegiatan ini meliputi pengambilan terumbu karang secara ilegal untuk dijadikan hiasan atau bahan bangunan, penambangan terumbu karang untuk mendapatkan batu karang, dan penangkapan ikan dengan cara yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau racun sianida. Selain itu, kegiatan pembangunan di pesisir pantai dan aktivitas pariwisata yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan eksploitasi terumbu karang.

Eksploitasi terumbu karang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan laut. Kerusakan terumbu karang dapat mengurangi produktivitas daerah tersebut, berdampak buruk pada populasi ikan dan mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan. Selain itu, eksploitasi terumbu karang juga dapat mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan, karena terumbu karang merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan dan hewan laut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian terumbu karang dengan mengurangi aktivitas eksploitasi dan melakukan upaya pelestarian seperti pembuatan terumbu karang buatan.

Aktivitas eksploitasi dan pengeboran minyak di laut disinyalir dapat mengancam ekosistem laut terutama terumbu karang yang dinilai rapuh. Tumpahan minyak dari kapal dan platform lepas pantai

merupakan sumber umum bagi minyak yang ditemukan dalam air laut, namun banyak pula minyak yang masuk ke air dari rembesan minyak alami yang berasal dari dasar laut. Perembesan alami mungkin merupakan sumber "besar" bagi minyak yang masuk ke lingkungan global, tetapi ekosistem terumbu karang saat ini tengah terancam oleh berbagai penyebab baik secara alami atau proses alam maupun akibat dampak dari aktivitas manusia.

Berbagai aktivitas manusia baik langsung maupun tak langsung yang dapat mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang. 68 Kerusakan terumbu karang akibat kejadian alami bisa berasal dari gempa bumi, tsunami, angin topan/badai, pemanasan global (*bleaching*), predator (*Acanthaster planci, Drupella*), asidifikasi, keterbukaan akibat surut laut dan terik matahari yang lebih lama. Adanya kerusakan terumbu karang di terumbu karang Kapoposang Sulawesi Selatan karena dimangsa oleh *Acanthaster planci*. Isu dan permasalahan pemanfaatan sumberdaya laut di beberapa wilayah Indonesia hamper sama. Ada masalah sumberdaya dan sosial di sekitar perairan Toili antara lain menurunnya hasil tangkapan, trend kerusakan ekosistem terumbu karang, fising ground yang makin jauh, biaya operasional penangkapan ikan yang kian meningkat, sebaliknya pendapatan nelayan yang menurun. 69

68 Mohammad Syakir, Kasim Mansyur, et. All, Pembelajaran pengelolan terumbu karang disekitar Lokasi pengeboran minyak dan gas lapangan tiaka, Tomori Sulawesi Tengah, *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan,* Vol.25 (2) Agustus 2015: 88-95.

69 Ibid

Kegiatan yang langsung merusak terumbu karang antara lain : penggunaan bahan peledak dan *cyanide* untuk menangkap ikan terumbu, penambangan karang, pariwisata, pembuangan jangkar, pembuangan limbah padat atau cair. Disamping itu, luapan sedimen dari daerah tambang terbuka menyebabkan kematian karang. Secara tak langsung yang dapat mengancam kerusakan terumbu karang misalnya reklamasi pantai dan pembukaan lahan daratan, penggundulan hutan, pembuangan limbah rumah tangga, dan lain-lain. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia hingga kini masih terus berlangsung hingga kerusakan terumbu karang berada pada taraf yang mengkhawatirkan. 70 Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem di bumi yang paling produktif dan paling kaya dari keanekaragaman hayati.

Terumbu karang menghadapi sederet panjang ancaman yang semakin hebat, termasuk penangkapan berlebihan, pembangunan pesisir, limpasan dari pertanian, dan pelayaran, konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkembang sangat penting artinya dari ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan setempat. Jika habitat terumbu karang dapat berfungsi secara optimal, maka produksi ikan-ikan karang akan dapat dimanfaatkan dan akan memberikan keuntungan

70 Ibid

secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat, untuk masa kini dan masa yang akan dating.

Semakin bertambahnya nilai ekonomis maupun kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam yang ada di terumbu karang seperti ikan, udang, lobster dan lainnya maka aktivitas yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut semakin besar pula, dengan demikian tekanan ekologis terhadap ekosistem terumbu karang juga akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem terumbu karang dan biota yang hidup didalamnya.71 Mengurangi laju degradasi yang terjadi pada terumbu karang akibat eksploitasi manusia masyarakat perlu mengelola dan menjaga terumbu karang agar manfaat serta fungsi terumbu karang dapat terjaga dengan baik.72

Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Namun di sisi lain terumbu karang juga merupakan salah satu ekosistem yang sangat terancam karena merupakan sumber keuntungan ekonomi yang besar dari perikanan dan pariwisata.

71 Wilda Yuliani, et.all, Pengelolaan ekosistem terumbuk karang oleh Masyarakat dikawasan lhokseudu kecamatan leupung kabupaten aceh besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Biologi*, Volume 1, Issue 1, Agustus 2016, hal 1-9.

72 Ibid

Hingga kini, tekanan yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pencemaran dari daratan dan praktek perikanan yang merusak telah dianggap sebagai ancaman utama untuk terumbu karang. Pengelolaan eksploitasi terumbu karang adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya terumbu karang secara berkelanjutan, sambil melindungi dan memulihkan ekosistem yang rentan ini. Terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menghadapi ancaman dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Strategi Pengelolaan Eksploitasi Terumbu Karang

* + 1. “Pengelolaan Berbasis Masyarakat;
    2. Regulasi dan Penegakan Hukum;
    3. Monitoring dan Evaluasi;
    4. Rehabilitasi Ekosistem;
    5. Zonasi Pengelolaan;
    6. Keterlibatan Pendidikan dan Penelitian”73

Dengan strategi-strategi ini, diharapkan eksploitasi terumbu karang dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga manfaat ekologis dan ekonomis dari ekosistem ini dapat dipertahankan untuk generasi mendatang, Sementara ancaman lain yang lebih potensial adalah kenaikan suhu permukaan air laut yang dapat menyebabkan

pemutihan karang (*coralbleaching).* Pemutihan dan kematian karang

73 Tenri A.R, et.all, Analisis strategi pengelolan ekosistem terumbu karang dikawasan konservasi periran daerah liukang tuppabiring, *Journal of Indonesian Tropical Fisheries,* ISSN 2655 4461 Vol. 3, No 2, Desember 2020 Hal 193 – 204.

secara besar-besaran yang pernah terjadi pada tahun 1998 diharapkan tidak terulang lagi, karena peristiwa ini telah mempengaruhi sebagian besar daerah terumbu karang di kawasan Indo-Pasifik. Pada tahun 1983 peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengamati peristiwa pemutihan karang besar-besaran dengan tingkat kematian. 74

### Tinjauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Terumbu karang

Penegakan hukum terhadap pengelolan dan kerusakan terumbu karang di Indonesia merupakan isu penting yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Meski sanksi sudah ditetapkan, implementasinya masih menjadi tantangan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan yang ada. Kerusakan dan hilangnya terumbu karang adalah suatu bentuk aktivitas manusia. Manusia yang melakukan kegiatan seperti eksploitasi masih kurang peduli tentang apa yang telah diatur dalam Undag- Undang Nomor 32 Tahun 2009 75 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

74 Dafiuddin Salim, Pengelolan eksploitasi terumbu karang akibat pemutihan *(Bleaching*) dan rusak, *Jurnal Kelautan*, Volume 5, No.2, 2012.

75 Siti Afifa Fadillah , Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak, 220 Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 2, November 2019, 219-226.

Lingkungan mengatur kerusakan terumbu karang. Bahkan, sanksi sudah ditulis dengan jelas.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini mengatur beberapa hal, di antaranya:

1. “Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara terpadu dan sistematis. Upaya ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
2. Kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara Lestari;
3. Hak asasi manusia setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan;
5. Bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu zat, energi, dan/atau komponen lain yang dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup;
6. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Undang-undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang utama yang mengatur pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perlindungan terhadap terumbu karang. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penambangan terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, atau menggunakan bahan peledak dan bahan beracun yang merusak ekosistem terumbu karang. Sanksi minimum yang ditetapkan adalah penjara selama dua tahun dan denda minimal Rp. 2 miliar uu ini telah diubah Undang-undang no 1 tahun 2014.76

Dengan diundangkannya UUPW2K yang dalam saksinya pidananya untuk perbuatan tertentu sudah mengatur sistem sansi pidana minimal. Dengan dianutnya sanksi pidana minimum dalam UUPW2K semestinya perusakan terhadap terumbu karang tidak terus meluas. Ini terutama dianutnya sistem sanksi pidana penjara dan pidana denda minimum dalam UUPW2K terhadap orang yang sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun 77 dan cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang berupa perbuatan:

* 1. “menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
  2. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
  3. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;

76 Op.cit, siti afifa.

77 Boy Yendra Tamin, Aspek hukum dan penerapan sanksi pidana, hukm pertanianan, https://[www.boyyendratamin.com/2011/04/aspek-hukum-dan-penerapan-sanksi.html.](http://www.boyyendratamin.com/2011/04/aspek-hukum-dan-penerapan-sanksi.html)

* 1. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.”

Kerusakan terumbu karang ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga untuk menindak lanjuti masalah tersebut, maka dilakukan berbagai langkah penyelesaian termasuk penanaman kembali terumbu karang yang russak tersebut. 78 Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari tindakan eksploitasi yang merusak. Kasus penegakan hukum kasus yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 4 Maret 2017, akibat dari peristiwa kandasnya kapal MV Caledonian Sky di Perairan Pulau Mios Mansuar Kabupaten Raja Ampat mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang diprediksikan seluas 1600 M2.

Kendala dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait kerusakan terumbu karang masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait terumbu karang;
2. Keterbatasan fasilitas, seperti alat transportasi untuk patroli, serta anggaran yang tidak memadai untuk kegiatan penegakan hukum;

78 Op.cit . Muharuddin, M., & Hidaya, W. A. (2020). 64-76

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian karena takut akan ancaman dari pelaku kejahatan.79

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi terumbu karang, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

* 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami regulasi dan teknik penyidikan yang tepat.
  2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya perlindungan terumbu karang dan sanksi bagi pelanggarnya dengan melakukan sosialisasi hukum.
  3. Membangun sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk pengawasan dan perlindungan terumbu karang.

Penegakan hukum terhadap eksploitasi terumbu karang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan memperkuat kapasitas penegak hukum, meningkatkan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku, serta mendorong partisipasi masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang dapat lebih efektif dan berkelanjutan. 80

79 Andi Rijal Bangsawan, Perlindungan hukum terumbu karang ditaman nasional takabonerate yang mengalami kerusakan akibat penambanganm karang Legal Protection of Coral Reefs in Takabonerate National Park Which Have Suffered Damage Due to Coral Mining*, Journal of Law*, Vol 21No. 2, 2023.

80 Op.cit , Arya prasetya, 2023.

Pengelolaan terumbu karang di Indonesia merupakan isu penting yang melibatkan aspek hukum administratif, perdata, dan pidana. Kerusakan terumbu karang sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan ilegal dan penggunaan bahan peledak. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi ekosistem ini.

### Aspek Administrasi

Dalam konteks administratif, administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 18 angka 29 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) [UU 27/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26898/undangundang-nomor-27-tahun-2007/document?utm_medium=pusatdata%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_27_2007), diterangkan sejumlah sanksi administratif sebagai berikut.81

* 1. “Peringatan tertulis;
  2. Penghentian sementara kegiatan;
  3. Penutupan lokasi;
  4. Pencabutan perizinan berusaha;
  5. Pembatalan perizinan berusaha;
  6. Denda administratif”.82

Pengelolaan terumbu karang diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 27

81 Hukum online, Mengenal saksi hukum pidana dan administrasi, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c4) [administratif-lt4be012381c4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c4) .

82 Ibid.

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil menjadi landasan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan konservasi terumbu karang. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan lokal yang mendukung upaya konservasi. Namun, seringkali terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas untuk pengawasan.

### Aspek Perdata

Aspek perdata berhubungan dengan tanggung jawab individu atau badan hukum yang merusak terumbu karang. Kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan seperti penambangan atau penggunaan bahan berbahaya dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi. Misalnya, dalam kasus kapal yang kandas dan merusak terumbu karang, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui mediasi atau negosiasi di luar pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyelesaian tersebut dalam memberikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.83

### Aspek Pidana

Aspek pidana berkaitan dengan tindakan kriminal yang merusak terumbu karang. Undang-undang Nomor 32 Tahun

83 Sholahuddin, F. K. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas di Taman Nasional Karimunjawa (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UUPW2K mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan, termasuk kerusakan terumbu karang. Sanksi dapat berupa hukuman penjara dan denda yang signifikan bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan eksploitasi atau perusakan terumbu karang. Namun, penegakan hukum dalam aspek ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kapasitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terumbu karang.84

Penegakan hukum terhadap pengelolaan terumbu karang di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung perlindungan terumbu karang, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam konservasi terumbu karang serta memperkuat penegakan hukum untuk melindungi ekosistem vital ini.

84 Nur Hamdi A. Himbukun ,Kajian hukum pidana terhadap terumbu karang akibat bahan peledak diwilayah taman naional keppulan togean, JIH Aktualita, Vol. 1 No.2 Agustus (2024).